



## Pemkot Petakan Potensi Pajak VHO

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan pendapatan dari sektor pajak perhotelan termasuk *Virtua! Hotel Operator* (VHO) yang kini tengah marak, masih menjadi prioritas untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pajak dan Retribusi P3ADK, Yuli Hidayat menjelaskan, VHO yang kian menjamur cukup potensial untuk mendongkrak pendapatan dari sektor pajak. Dia mengatakan, sejumlah VHO yang bekerjasama dengan hotel induk tetap dikenakan pajak. "Mereka, VHO itu tetap melakukan pembayaran ke hotel induk. Pembayaran itu yang kemudian ada pajaknya," imbuh dia, Senin (2/12).

Namun dengan dalih kerahasiaan wajib pajak, ia enggan menjelaskan lebih jauh bagaimana sistem pembayaran dan juga pengenaan pajak untuk sektor itu.

Yuli menguraikan, pada prinsipnya selama VHO itu bekerja sama dengan pihak hotel yang mempunyai NPWPD, maka yang membayar pajak adalah pihak hotel. "VHO membayar ke pihak hotel dan dari yang dibayarkan tadi ada pajaknya," terang dia.

Namun, jika VHO tidak bekerja sama langsung dengan pihak hotel atau langsung mengelola sendiri perusahaan properti itu, maka VHO mesti mengurus NPWPD dan melakukan pembayaran pajak atas penghasilan dari hotel tersebut. "Untuk pajak hotel masih dominan dan menjadi prioritas kami, BPKAD juga sudah mulai melakukan pemetaan di lapangan," urainya.

Sementara, dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata dan mulai beroperasinya Yogyakarta International Airport (YIA), semakin membuka luas masuknya para wisatawan baik domes-

tik maupun mancanegara.

Seiring dengan peningkatan tersebut, sejumlah permasalahan timbul pada bisnis perhotelan seperti pengaturan atau regulasi investor asing yang bergerak pada bidang pengelolaan VHO.

Sejumlah VHO pun marak mengajak hotel lokal nonbin-tang untuk berkolaborasi dan bergabung dengan kesepakatan dua pihak. Pelbagai pelaku usaha perhotelan di Yogyakarta pun mengaku mulai merasakan dampak negatif dari keberadaan VHO tersebut.

Pemilik Hotel Kinasih Yogyakarta, Tulus Riyadi Wardoyo mengatakan, pihaknya sudah sering didatangi oleh salah satu VHO tersebut. "Mereka lima kali lebih mendatangi saya, dan setelah dipelajari terdapat sejumlah peraturan yang membe-beratkan hotel pada akhirnya," ujar Tulus.

Dia menjelaskan, perjanjian bisnis yang diterapkan meng-

haruskan pemilik hotel untuk dapat mengikutinya. Akan tetapi pada akhirnya akan membe-beratkan bahkan akan mengikat hotel itu sendiri.

"Peraturan yang mereka tawarkan sangat bertentangan dengan peraturan hotel kami sendiri. Seperti dalam menentukan harga hotel, mereka yang menentukan, bukan kami," jelasnya.

Tulus melanjutkan, para pemilik hotel harus jeli dalam memperhatikan aturan main yang mereka tawarkan. Awalnya akan diberikan sejumlah uang untuk mengikat perjanjian. Namun berjalannya waktu tidak ada peningkatan dalam pembagian hasil hotel.

"Pemilik hotel di Yogyakarta harus lebih jeli memperhatikan perjanjian yang mereka ajukan. Memang menerima uang terlebih dahulu akan tetapi dikemudian hari akan kecewa, tapi semua kembali kepada pemilik hotel," lanjut Tulus. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P 2. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005